

**BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
(BPKP)**

**LaporanBarang Milik Negara (Audited)**

Untuk Periodeyang Berakhir 31 Desember2016

JalanPramuka No. 33,

Jakarta Timur 13120

**KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu entitas akuntansi pemerintah pusat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM6.2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPKP. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 26 April 2017

Kepala Biro Umum,



Sihar Panjaitan  
NIP 19581020 198203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	2
LAPORAN POSISI BMN DI NERACA .....	4
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL.....	5
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL.....	6
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN.....	7
LAPORAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan .....	8
LAPORAN ASET TAK BERWUJUD .....	9
LAPORAN BARANG BERSEJARAH.....	10
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN .....	11
LAPORAN PENYUSUTAN .....	12
LAPORAN BPYBDS .....	13
LAPORAN BARANG HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA.....	14
LAPORAN BARANG RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA .....	15
LAPORAN KONDISI BARANG.....	16
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN).....	17

**LAPORAN POSISI BMN DI NERACA**

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL**

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL**

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN**

**LAPORAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**



**LAPORAN ASET TAK BERWUJUD**

**LAPORAN BARANG BERSEJARAH**

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN**

**LAPORAN PENYUSUTAN**

**LAPORAN BPYBDS**

**LAPORAN BARANG HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE  
PENGELOLA**

**LAPORAN BARANG RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE  
PENGELOLA**

**LAPORAN KONDISI BARANG**



## **CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN)**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM6.2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.

## **2. Entitas pelaporan**

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-EI),
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-EI merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan, UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

BPKP merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Kepala BPKP.

## **3. Periode Pelaporan**

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada BPKP ini disusun dan disajikan untuk periode tahunan (periode yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan).

## **B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

### **1. Kapitalisasi**

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN Tahun 2013 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

## **2. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusunan Laporan BMN BPKP Tahun Anggaran 2013, sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar sebagai berikut.

1. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Asset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
2. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

4. Penyusutan Asset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
5. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

### **C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Barang Persediaan
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan)
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5. Laporan Aset tak Berwujud
6. Laporan Barang Bersejarah
7. Laporan Kondisi Barang (Untuk Tahunan)
8. Laporan Penyusutan
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK-SIMAK pada BPKP

## D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

Persediaan  
Rp8.312.046.607

### Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp8.312.046.607,00 dan Rp8.746.019.409,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel berikut ini:

**Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015**

Jenis Persediaan	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
Barang Konsumsi	6.234.765.580	6.762.821.931
Bahan untuk Pemeliharaan	473.765.775	495.537.675
Suku Cadang	19.011.220	31.621.365
Bahan Baku	3.725.000	297.071.440
Persediaan Lainnya	1.580.779.032	1.158.966.998
<b>Total</b>	<b>8.312.046.607</b>	<b>8.746.019.409</b>

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp8.312.046.607,00 berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap  
Rp1.855.788.839.885

### Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.855.788.839.885,00 dan Rp1.851.402.344.806,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel berikut ini:

**Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015**

No.	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
1	Tanah	1.041.532.486.075	1.044.359.436.558
2	Peralatan dan Mesin	315.487.604.150	310.669.492.725
3	Gedung dan Bangunan	899.674.199.559	808.458.385.816
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.317.578.738	15.317.578.738
5	Aset Tetap Lainnya	2.454.615.492	2.481.645.492
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.440.077.500	45.218.093.911
	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>2.275.906.561.514</b>	<b>2.226.504.633.240</b>

7	Akumulasi Penyusutan	(420.117.721.629)	(375.102.288.434)
<b>Nilai Buku</b>		<b>1.855.788.839.885</b>	<b>1.851.402.344.806</b>

Tanah  
Rp1.041.532.486.075

### Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPKP per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.041.532.486.075,00 dan Rp1.044.359.436.558,00.

Mutasi nilai perolehan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	1.044.359.436.558
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Hibah	41.576.517
- Reklasifikasi dari KDP	1.916.576.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>1.958.152.517</b>
<b>Mutasi Kurang: Penghapusan</b>	<b>(4.785.103.000)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	1.041.532.486.075

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Tanah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Hibah sebesar Rp41.576.517,00 merupakan realisasi penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp1.916.576.000,00 merupakan pencatatan atas realisasi belanja modal tahun 2015 untuk pematangan lahan gedung kantor pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Penghapusan sebesar Rp4.785.103.000,00 merupakan BMN *Idle* yang telah diserahkan ke Kementerian Keuangan, yaitu pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar Rp404.000.000,00, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.107.453.000,00, dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sebesar Rp273.650.000,00.

Dalam saldo Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.041.532.486.075,00, termasuk:

- Tanah yang dipinjam pakai oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perjanjian Nomor PRJ-9/PW16/1/2016 tanggal 21 November 2016 berupa 5 bidang tanah untuk gedung kantor dan rumah negara dengan nilai perolehan sebesar Rp3.370.500.000,00.
- Tanah dalam proses angsuran sewa beli rumah negara kepada

Syamsuddin dan Soediby yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00288 Rawasari.

- Tanah dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan yaitu:
  - Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 seluas 980 M2 di Jl. Kasuari Nomor 5, Makassar dengan nilai Rp1.185.800.00,00. Hasil sengketa di tingkat Banding sesuai Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 97/PDT/2016/PT. Mks tanggal 15 Juli 2016, pihak penggugat dinyatakan kalah, dan sampai saat ini masih dalam proses Kasasi.
  - Tanah seluas 92 M2 di Desa Wua-Wua yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 202 seluas 1.000 M2 dengan nilai Rp172.000.000,00. Hasil sengketa di tingkat Banding sesuai Keputusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2015/PT. Sultra tanggal 24 Juni 2015, pihak penggugat dinyatakan kalah, dan sampai saat ini masih dalam proses Kasasi.

*Peralatan dan Mesin*  
Rp315.487.604.150

#### **Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp315.487.604.150,00 dan Rp310.669.492.725,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp259.356.024.842,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp56.131.579.308,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	310.669.492.725
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Pembelian	9.018.936.308
- Transfer Masuk	3.342.923.233
- Hibah	50.100.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>12.411.959.541</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Transfer Keluar	(3.342.923.233)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.882.956.184)
- Penghapusan	(2.367.968.699)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(7.593.848.116)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	315.487.604.150
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(259.356.024.842)



Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp9.018.936.308,00 merupakan realisasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.028.440.458,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp960.514.250,00 dan kapitalisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp29.981.600,00.
- Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp3.342.923.233,00 merupakan perpindahan Peralatan dan Mesin antar satuan kerja di lingkungan BPKP, sebagaimana akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.
- Hibah sebesar Rp50.100.000,00 merupakan realisasi penerimaan Peralatan dan Mesin dari pihak ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar Rp25.100.000,00, dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp25.000.000,00.
- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp1.882.956.184,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-Lain melalui transaksi "penghentian aset tetap dari penggunaan" yang disebabkan BMN kondisinya Rusak Berat sesuai dengan hasil inventarisasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Pusdiklatwas	14.203.750	7.609.149	6.594.601
2	Perw. BPKP Prov. Sumatera Utara	78.276.600	78.131.400	145.200
3	Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat	339.064.553	339.064.553	-
4	Perw. BPKP Prov. Jambi	313.916.375	313.916.375	-
5	Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan	551.163.620	543.122.620	8.041.000
6	Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tengah	386.890.509	385.313.373	1.577.136
7	Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur	199.440.777	185.241.536	14.199.241
	<b>Total</b>	<b>1.882.956.184</b>	<b>1.852.399.006</b>	<b>30.557.178</b>

- Penghapusan sebesar Rp2.367.968.699,00 merupakan penghapusan dari Neraca atas aset yang telah dilelang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Puslitbangwas	511.888.003	507.296.635	4.591.368
2	Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta	669.607.565	667.239.845	2.367.720
3	Perw. BPKP Prov. Jambi	8.745.000	8.745.000	-
4	Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan	359.979.330	359.107.032	872.298
5	Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tenggara	363.341.174	360.599.101	2.742.073

6	Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur	432.220.627	430.058.226	2.162.401
7	Perw. BPKP Prov. Kep. Bangka Belitung	22.187.000	20.293.900	1.893.100
	<b>Total</b>	<b>2.367.968.699</b>	<b>2.353.339.739</b>	<b>14.628.960</b>

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.840.888.125,00, termasuk realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp54.600.000,00.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp899.674.199.559

### Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp899.674.199.559,00 dan Rp808.458.385.816,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp152.738.765.942,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp746.935.433.617,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Nilai Perolehan per 31 Desember 2015</b>	<b>808.458.385.816</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
➤ Pembangunan Gedung Baru	31.951.656.750
➤ Reklasifikasi dari KDP	41.389.483.817
➤ Pengembangan Nilai Aset	17.649.694.315
➤ Hibah	683.534.000
➤ Transfer Masuk	1.107.821.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>92.782.189.882</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
➤ Transfer Keluar	(1.055.821.000)
➤ Penghapusan	(433.941.874)
➤ Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap	(76.613.265)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(1.566.376.139)</b>
<b>Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>899.674.199.559</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016</b>	<b>(152.738.765.942)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>746.935.433.617</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Pembangunan gedung baru sebesar Rp31.951.656.750,00 merupakan realisasi Belanja Modal Tahun 2016 untuk pembangunan gedung kantor baru pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp20.065.661.100,00 yaitu dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

Rp19.942.629.700,00, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp123.031.400,00, dan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp11.885.995.650,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

- Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp41.389.483.817,00 merupakan pencatatan atas gedung kantor yang fisiknya telah 100% pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp36.900.000,00, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp15.674.682.699,00, dan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp25.677.901.118,00.
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp17.649.694.315,00 merupakan pencatatan atas rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas pada satuan kerja di lingkungan BPKP yang berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, termasuk realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp103.230.000,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Hibah sebesar Rp683.534.000,00 merupakan realisasi penerimaan Gedung dan Bangunan dari pihak ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebesar Rp308.534.000,00, dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp375.000.000,00.
- Transfer Masuk dan Transfer Keluar masing-masing sebesar Rp1.107.821.000,00 dan Rp1.055.821.000,00 merupakan perpindahan Gedung dan Bangunan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ke Pusdiklatwas dalam rangka pembentukan Balai Diklat di Makassar. Selisih Transfer Masuk dengan Transfer Keluar sebesar Rp52.000.000,00 merupakan Transfer Masuk pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dari Ombudsman RI berupa rehab gedung yang dipinjam pakai oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan.
- Penghapusan sebesar Rp433.941.874,00 merupakan penghapusan Gedung dan Bangunan karena BMN *Idle* dan diserahkan ke Kementerian Keuangan, terdiri atas:

Nama Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Perw. BPKP D.I. Yogyakarta	112.613.000	24.774.860	87.838.140
Perw. BPKP Prov. Sumatera Selatan	266.711.000	63.047.953	203.663.047
Perw. BPKP Prov. Maluku	54.617.874	36.473.751	18.144.123
<b>Total</b>	<b>433.941.874</b>	<b>124.296.564</b>	<b>309.645.310</b>

- Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp76.613.265,00

merupakan koreksi nilai perolehan karena pengembalian realisasi belanja modal tahun anggaran yang lalu, terdiri atas:

Nama Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Pusdiklatwas	8.262.194	1.239.329	7.022.865
Perw. BPKP Prov. Gorontalo	67.812.871	678.129	67.134.742
Perw. BPKP Prov. Bengkulu	538.200	100.342	437.858
<b>Total</b>	<b>76.613.265</b>	<b>2.017.800</b>	<b>74.595.465</b>

Dalam saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp899.674.199.559,00, termasuk nilai bangunan yang digunakan sementara oleh:

- Kementerian Keuangan berdasarkan Perjanjian Nomor PRJ-1668/SU/05/2016 tanggal 22 Juli 2016, yaitu 4 buah bangunan kantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta dengan nilai perolehan Rp62.863.895.219,00.
- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perjanjian Nomor PRJ-9/PW16/1/2016 tanggal 21 November 2016 berupa 5 buah gedung kantor dan rumah negara dengan nilai perolehan sebesar Rp298.913.500,00

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*  
Rp15.317.578.738

### **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp15.317.578.738,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.681.620.340,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp7.635.958.398,00.

Sampai dengan 31 Desember 2016 tidak terdapat mutasi tambah/kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

*Aset Tetap Lainnya*  
Rp2.454.615.492

### **Aset Tetap Lainnya**

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.454.615.492,00 dan Rp2.481.645.492,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp341.310.505,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp2.113.304.987,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai  
Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2016 - Semester II (Audited)

berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	2.481.645.492
Mutasi Tambah:	-
Mutasi Kurang: Penghentian Aset dari Penggunaan	(27.030.000)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	2.454.615.492
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(341.310.505)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	2.113.304.987

➤ Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp27.030.000,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-Lain, terdiri atas:

Nama Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat	2.150.000	2.150.000	-
Perw. BPKP Prov. Jambi	24.880.000	-	24.880.000
<b>Total</b>	<b>27.030.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>24.880.000</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Rp1.440.077.500

### Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.440.077.500,00 dan Rp45.218.093.911,00. Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	45.218.093.911
Mutasi Tambah: Realisasi Belanja Modal	149.500.000
Mutasi Kurang:	
- Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap	(621.456.594)
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(41.389.483.817)
- Reklasifikasi ke Tanah	(1.916.576.000)
Jumlah Mutasi Kurang	(43.927.516.411)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	1.440.077.500

➤ Mutasi Tambah sebesar Rp149.500.000,00 merupakan perolehan KDP dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang masih dalam proses pengerjaan.

➤ Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp621.456.594,00 merupakan koreksi nilai perolehan karena pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp438.430.212,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp183.026.382,00.

- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.389.483.817,00 merupakan pencatatan perolehan Gedung dan Bangunan yang pekerjaan fisiknya telah selesai 100%, yaitu pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp36.900.000,00, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp15.674.682.699,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp25.677.901.118,00.
- Reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp1.916.576.000,00 merupakan pencatatan realisasi belanja modal tahun 2015 berupa pematangan lahan/tanah untuk pembangunan gedung kantor pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang sampai dengan tanggal neraca pekerjaan fisiknya belum selesai 100%.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Perw. BPKP Prov. Kep. Bangka Belitung	693.110.000
2	Perw. BPKP Prov. Maluku Utara	149.500.000
3	Perw. BPKP Prov. Papua Barat	597.467.500
	<b>Total</b>	<b>1.440.077.500</b>

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp420.117.721.629

#### Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp420.117.721.629,00 dan Rp375.102.288.434,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	1.041.532.486.075	-	1.041.532.486.075
2	Peralatan dan Mesin	315.487.604.150	259.356.024.842	56.131.579.308
3	Gedung dan Bangunan	899.674.199.559	152.738.765.942	746.935.433.617
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.317.578.738	7.681.620.340	7.635.958.398
5	Aset Tetap Lainnya	2.454.615.492	341.310.505	2.113.304.987

R	6	KDP	1.440.077.500	-	1.440.077.500
i		<b>Total</b>	<b>2.275.906.561.514</b>	<b>420.117.721.629</b>	<b>1.855.788.839.885</b>

**ncian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016**

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2015 (Rp)	Saldo per 31/12/2016 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	240.376.801.439	259.356.024.842	18.979.223.403	23.109.752.574	(4.130.529.171)
2	Gedung dan Bangunan	127.415.402.050	152.738.765.942	25.323.363.892	24.177.071.813	1.146.292.079
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.976.267.190	7.681.620.340	705.353.150	721.560.507	(16.207.357)
4	Aset Tetap Lainnya	333.817.755	341.310.505	7.492.750	9.642.750	(2.150.000)
	<b>Total</b>	<b>375.102.288.434</b>	<b>420.117.721.629</b>	<b>45.015.433.195</b>	<b>48.018.027.644</b>	<b>(3.002.594.449)</b>

Penjelasan atas selisih tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Normalisasi Penyusutan (Rp)	Pengembalian Belanja TAYL (Rp)	Penghapusan (Rp)	Reklasifikasi ke Aset Lain (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	75.209.574	-	(2.353.339.739)	(1.852.399.006)	(4.130.529.171)
2	Gedung dan Bangunan	1.272.606.443	(2.017.800)	(124.296.564)	-	1.146.292.079
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(16.207.357)	-	-	-	(16.207.357)
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	(2.150.000)	(2.150.000)
	<b>Total</b>	<b>1.331.608.660</b>	<b>(2.017.800)</b>	<b>(2.477.636.303)</b>	<b>(1.854.549.006)</b>	<b>(3.002.594.449)</b>

*Aset Lainnya*  
Rp14.129.312.167

**Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp14.129.312.167,00 dan Rp14.917.600.363,00, yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

**Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015**

No.	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	24.111.675.470	14.391.215.470
2	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	3.127.824.000	-
3	Aset Lain-Lain	2.938.140.125	2.529.430.988
	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>30.177.639.595</b>	<b>16.920.646.458</b>
4	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	(16.048.327.428)	(2.003.046.095)
	<b>Nilai Buku</b>	<b>14.129.312.167</b>	<b>14.917.600.363</b>

*Aset Tak Berwujud*

**Aset Tak Berwujud**

Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2016 - Semester II (Audited)

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp24.111.675.470,00 dan Rp14.391.215.470,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.614.503.167,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp10.497.172.303,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software*.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	14.391.215.470
<b>Mutasi Tambah:</b>	
➢ Pengadaan Aplikasi	9.145.430.000
➢ Pembelian <i>Software</i>	579.650.000
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>9.725.080.000</b>
<b>Mutasi Kurang: Penghapusan</b>	<b>(4.620.000)</b>
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	24.111.675.470
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2016	(13.614.503.167)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2016</b>	<b>10.497.172.303</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Aplikasi sebesar Rp9.145.430.000,00 merupakan realisasi Belanja Jasa Konsultan untuk pembayaran jasa konsultan dalam rangka pembuatan aplikasi SIMA pada Pusinfowas dari dana Pinjaman Luar Negeri.
- Pembelian *Software* sebesar Rp579.650.000,00 merupakan realisasi pengadaan yang berasal dari Belanja Modal Lainnya pada Pusbin JFA sebesar Rp49.000.000,00, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Pusdiklatwas sebesar Rp530.650.000,00.
- Penghapusan sebesar Rp4.620.000,00 merupakan penghapusan *software* yang tidak digunakan lagi pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kantor Pusat BPKP	3.458.374.100	3.100.321.602	358.052.498
2	Pusdiklatwas BPKP	664.215.000	152.717.500	511.497.500
3	Puslitbangwas	54.400.000	54.400.000	-
4	Pusinfowas	19.809.933.681	10.230.115.126	9.579.818.555
5	Pusbin JFA	49.000.000	6.125.000	42.875.000
6	Perw. BPKP Prov. Jawa Barat	11.099.000	11.099.000	-
7	Perw. BPKP Prov. Jawa Tengah	55.403.689	53.849.939	1.553.750



8	Perw. BPKP Prov. Kalimantan Timur	3.850.000	3.850.000	-
9	Perw. BPKP Prov. Kepulauan Riau	5.400.000	2.025.000	3.375.000
	<b>Total</b>	<b>24.111.675.470</b>	<b>13.614.503.167</b>	<b>10.497.172.303</b>

Aset Tak Berwujud  
Dalam Pengerjaan  
Rp3.127.824.000

### Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.127.824.000,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan realisasi Belanja Jasa Konsultan dalam rangka pembuatan aplikasi *e-learning* pada Pusdiklatwas dari dana Pinjaman Luar Negeri, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp744.720.000,00, dan tahun 2016 sebesar Rp2.383.104.000,00.

Aplikasi tersebut sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pengerjaan, yang direncanakan selesai pada tahun 2017.

Aset Lain-Lain  
Rp2.940.600.855

### Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.940.600.855,00 dan Rp2.529.430.988,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPKP serta dalam proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap, tetapi digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.708.286.391,00, sehingga nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan sebesar Rp232.314.464,00.

Mutasi nilai Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	2.529.430.988
Mutasi Tambah: Penghentian Aset Tetap dari Penggunaan	1.909.986.184
Mutasi Kurang: Penghapusan BMN	(1.498.816.317)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	2.940.600.855
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(2.708.286.391)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	232.314.464

Nilai perolehan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.940.600.855,00 seluruhnya merupakan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi Tambah karena Penghentian Aset Tetap dari Penggunaan sebesar Rp1.909.986.184,00 merupakan reklasifikasi dari Peralatan

dan Mesin sebesar Rp1.882.956.184,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp27.030.000,00 yang tidak digunakan lagi dalam operasional kantor serta dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Satuan Kerja	Peralatan dan Mesin (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pusdiklatwas	14.203.750	-	14.203.750
2	Perw. BPKP Prov. Sumatera Utara	78.276.600	-	78.276.600
3	Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat	339.064.553	2.150.000	341.214.553
4	Perw. BPKP Prov. Jambi	313.916.375	24.880.000	338.796.375
5	Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan	551.163.620	-	551.163.620
6	Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tengah	386.890.509	-	386.890.509
7	Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur	199.440.777	-	199.440.777
	<b>Total</b>	<b>1.882.956.184</b>	<b>27.030.000</b>	<b>1.909.986.184</b>

➤ Mutasi Kurang karena Penghapusan Barang Milik Negara sebesar Rp1.498.816.317,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kantor Pusat	289.460.397	-	289.460.397
2	Perw. BPKP Aceh	263.176.000	263.176.000	-
3	Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat	916.801.587	916.801.587	-
4	Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan	3.696.000	2.587.200	1.108.800
5	Perw. BPKP Prov. Kepulauan Riau	25.682.333	21.246.685	4.435.648
	<b>Total</b>	<b>1.498.816.317</b>	<b>1.203.811.472</b>	<b>295.004.845</b>

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel berikut ini:

#### Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016

No.	Nama Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kantor Pusat BPKP	234.100.000	47.202.385	186.897.615
2	Pusdiklatwas BPKP	887.861.378	881.083.863	6.777.515
3	Perw. BPKP Prov. Sumatera Utara	78.276.600	78.276.600	-
4	Perw. BPKP Aceh	264.071.596	264.071.596	-
5	Perw. BPKP Prov. Jambi	338.796.375	313.916.375	24.880.000
6	Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan	551.163.620	550.393.620	770.000
7	Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tengah	386.890.509	385.707.657	1.182.852
8	Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur	199.440.777	187.634.295	11.806.482
	<b>Total</b>	<b>2.940.600.855</b>	<b>2.708.286.391</b>	<b>232.314.464</b>

Akumulasi  
Penyusutan/  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp16.324.714.558

#### Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp16.324.714.558,00 dan Rp2.003.046.095,00. Saldo per

31 Desember 2016 dan 2015 terdiri atas:

No.	Uraian	31 Des 2016 (Rp)	31 Des 2015 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	13.616.428.167	-
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	2.708.286.391	2.003.046.095
	<b>Total</b>	<b>16.324.714.558</b>	<b>2.003.046.095</b>

Akumulasi Amortisasi *Software* per 31 Desember 2016 sebesar Rp13.616.428.167,00 terdiri dari amortisasi pertama kali sebesar Rp11.439.932.856,00 dan beban amortisasi tahun 2016 sebesar Rp2.176.495.311,00.

Jika saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2016 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015, terdapat mutasi sebesar Rp705.240.296,00. Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2016 sebesar Rp55.263.388,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp649.976.908,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap	(1.854.549.006)
2	Penghapusan	1.203.811.472
3	Normalisasi Penyusutan	760.626
	<b>Total</b>	<b>(649.976.908)</b>

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut

## **E. INFORMASI BMN LAINNYA**

### **1. Pendapatan (PNBP) dari Pengelolaan BMN**

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (4231) sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi sebesar 133,46% dari target sebesar Rp2.689.250.000,00 yaitu sebesar Rp4.373.203.080,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Penjualan Lainnya	11.600.000,00
b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	46.303.000,00
c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.311.700.080,00
d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.00,00

### **2. Penyerahan BMN Idle**

BPKP telah menyerahkan BMN Tanah dan/ atau bangunan *Idle* pada tahun 2016 yaitu pada Satker Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk Satker Kantor Pusat BPKP dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan diserahkan pada Bulan Januari 2017.